

Kegagalan Implementasi *E-Government* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi

Bilal Sukarno, Natasha Feralika Ginting, Rifki Ichwanusafa, Shafa Kinar
Qamara, Syifa Annisa Rochmani
bilals@upnvj.ac.id, natashaf@upnvj.ac.id, rifikii@upnvj.ac.id,
shafak@upnvj.ac.id, syifaar@upnvj.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia, termasuk Indonesia berdampak ke semua aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pelayanan birokrasi yang semula dilakukan secara konvensional (tatap muka) dipaksa untuk beradaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi (*e-government*). Dengan harapan birokrasi tetap mampu melayani masyarakat dengan baik dalam situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin melihat dan menganalisis bagaimana implementasi *e-government* di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian *e-government* di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berkesimpulan implementasi *e-government* di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terlihat belum maksimal dan gagap merespon pandemi COVID-19. Hal ini karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini berupaya memberikan alternatif kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, *E-Government*, Pelayanan Publik

Abstract

COVID-19 pandemic spreading to the whole world including Indonesia affects to all aspects of people's life. Bureaucracy service that had been previously performed conventionally (face to face) was forced to adapt by maximalizing bureaucracy service which is technology-based (e-government). In the hope that bureaucracy is still able to service the society well in COVID-19 pandemic situation. This research wants to see and analyze how to implement e-government in work environment Departement of Population and Civil Registration of Bekasi Regency as well as whatever becomes challenge in implementation of e-government in Bekasi Regency. The research method which is used in this research uses library research method. This research concludes that implementation of e-government in work environment of Departement of Population and Civil Registration of Bekasi Regency has not been maximal and slow in responding COVID-19 pandemic. The thing is provoked by several obstacles and challenges in its implementation. The research attempts to provide an alternative policy for the government of Bekasi Regency especially the Civil Registry Service Office in resolving the bureaucratic service problem in the COVID-19 pandemic era.

Keywords: COVID-19, *E-Government*, Public Service,

Pendahuluan

Sejak diumumkannya kasus COVID-19 untuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini tanggal 27 Juni 2021 COVID-19 telah menginfeksi 2.093.962 orang positif, 56.729 orang meninggal dunia, dan pasien sembuh berjumlah 1.842.457 orang (Covid19.go.id 2021). Mengingat dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini cukup besar, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Ini membuat beberapa aktivitas yang biasa dilakukan secara langsung diberhentikan. Pelayanan birokrasi yang semula dilakukan secara konvensional (tatap muka) dipaksa untuk beradaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi. Dengan harapan birokrasi tetap mampu melayani masyarakat dengan baik dalam situasi pandemi COVID-19. Dwiyanto (2011:181) telah mengungkapkan bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas, serta transparansi pelayanan publik (Septiani 2020).

Kebijakan mengenai *e-government* ini sudah dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, hal ini baru dianggap penting dan harus benar-benar diterapkan justru ketika keadaan sudah genting seperti hari ini. Sehingga dengan diterapkannya *e-government* diharapkan bisa membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyajikan setiap layanan yang berkualitas (Alhomoud, S., Shafi 2012). Melalui studi ini, penulis menganalisis bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi selama pandemi ini dengan menggunakan pendekatan teori *e-government*.

Pada penelitian sebelumnya, penulis menyoroti penelitian yang dilakukan Trie Tifany Natasha Panggabean dan Anwar Saragih (Tifany, Panggabean, and Natasha Panggabean 2020) untuk menganalisis kondisi penerapan *e-government* di lingkungan birokrasi Pemerintahan Jayapura di era

new normal (kenormalan baru). Hasilnya, Pemerintahan Kota Jayapura khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berbenah dalam menciptakan pelayanan cerdas dan efektif dimasa pandemi COVID-19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sudah menerapkan prinsip *e-goverment* dengan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online lewat website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangannya yang dihadapi Pemerintahan Kota Jayapura dalam penerapan *e-government* yaitu berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan tingkat ekonomi masyarakat karena mengharuskan setiap masyarakat memiliki *smartphone*.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan beberapa alasan mengapa perlu penelitian lanjutan dan perlu dilakukan di Kota yang berbeda. Pertama, pengambilan *sample* dan fokus hanya dilakukan di Kota Jayapura, jadi diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat peneapan *e-government* di Kota yang lainya dalam hal ini penulis akan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai *sample* penelitian. Kedua, penulis perlu melakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan input secara langsung yang berguna untuk pertimbangan evaluasi kebijakan pemerintah dalam penerapan *e-government* di masa pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan *e-government* di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Juga mengulas alasan bentuk pelayanan yang tetap dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mendalami mengenai penyesuaian pemerintah, masyarakat, dan pandemi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode deksriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Desain penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan melewati beberapa tahapan, yaitu : pertama, membaca, mencatat dan menganalisis berbagai temuan yang relevan dengan pembahasan implementasi *e-government* dalam pelayanan birokrasi dimasa pandemi COVID-19 khususnya

di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Kedua, memadukan segala temuan penulis baik teori penerapan *e-government*, maupun konsep implementasi penerapan *e-government* yang dilakukan kota-kota lain sebagai studi perbandingan. Tahapan terakhir, menganalisis segala temuan penulis dari berbagai bacaan serta memberikan ulasan kritis dengan mengelaborasi data maupun teori dari temuan bacaan pustaka sebelumnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada nilai asesmen yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yakni Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, dan Aplikasi (Direktorat E-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012).

Hasil

Di tengah masa krisis COVID-19, pelayanan birokrasi dipaksa untuk merubah strategi agar tetap bisa melayani masyarakat dengan baik, strategi yang diterapkan diharapkan mampu membuat kerja-kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap efektif dan efisien walaupun bekerja dari rumah (*work from home*). Dalam kondisi ini Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus bertanggung jawab dalam pelayanan, transparansi data dan kecepatan proses kepengurusan administrasi masyarakat.

Tanggung jawab tersebut dirasa mudah untuk direalisasikan jika sistem pemerintahan berbasis *e-government* sudah diterapkan. Gagasan mengenai *e-government* selaras dengan apa yang disampaikan oleh Anttiroiko (2008) yang berpendapat bahwa dalam mendukung kinerja sebuah birokrasi pemerintahan agar lebih responsif dan efisien dibutuhkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi seperti internet dan web dalam birokrasi tersebut. Sependapat dengan itu Scott (2006) juga mendefinisikan penerapan teknologi informasi oleh sebuah lembaga pemerintahan digunakan sebagai upaya mentransformasikan hubungan dengan rakyat, sektor swasta maupun aktor kepentingan lainnya sehingga memunculkan hubungan yang lebih partisipatif. (J 2006)

Kebijakan dan Kelembagaan

Ditinjau dari sisi kebijakan dan kelembagaan penerapan *e-government*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura, Provinsi Papua sudah menerapkan pelayanan berbasis *e-government*. Bentuk pelayanan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan berbasis elektronik meliputi: pengurusan akta lahir, akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) hingga akta kematian. Tentu saja hal ini dilakukan demi mendukung kebijakan pemerintah *new normal* agar terhindar dari kegiatan fisik dan menghindari pertemuan supaya tidak terjadi penyebaran virus dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tifany, Panggabean, and Natasha Panggabean 2020).

Berbeda dengan Jayapura, Kabupaten Bekasi yang dikenal memiliki pusat industri dan dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta, justru dinilai gagap dalam peneparan pelayanan birokrasi berbasis *e-government*. Pada Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Bekasi memilih untuk membuka dan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik di Cikarang Utara, yang melayani perihal surat izin sampai mengenai catatan sipil. Tujuan Pemerintah Kabupaten Bekasi mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) ini sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat karena di satu tempat inilah seluruh pelayanan masyarakat dijalankan. Tentu saja hal ini merupakan bentuk keputusan yang kurang bijak mengacu kepada kondisi pandemi COVID-19 dan aturan pemerintah pusat yang menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi, Sutiaresmulyawan, penerapan MPP ketika pandemi COVID-19 ini tetap melayani masyarakat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bekasi 2020).

Padahal dalam Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bekasi No. 64 Tahun 2016 “Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi” pasal 23 poin C memuat Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas salah satunya menyusun norma, standar, prosedur dan

kriteria (NPSK) yang menyangkut layanan infrastruktur dasar *data centre*, layanan dan manajemen data dan informasi *e-government*, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 25 ayat D juga memuat tugas dari Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi diantaranya : Menyelenggarakan pengelolaan dan operasional yang menyangkut layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Uraian di atas dapat menjadi landasan bahwa Kabupaten Bekasi terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah seharusnya mampu menerapkan *e-government* dalam pola pelayanannya terlebih dimasa pandemi COVID-19 ini.

Infrastruktur dan Aplikasi



Gambar 1. Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Sumber : *Website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<http://sitepak.bekasikab.go.id/esiak/>

Pada gambar di atas merupakan *website* resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan domain: <http://sitepak.bekasikab.go.id/esiak/> yang menerangkan bahwa *website* tersebut masih dalam perbaikan dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat di situasi pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi gagap dalam pengimplementasian sebuah kebijakan berupa penerapan layanan berbasis *e-government* di lingkungan kerja mereka. Gagapnya implementasi *e-government* pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tentu menyebabkan pelayanan kepada masyarakat akan tidak efektif dan efisien di tengah pandemi COVID-19.



Gambar 2 . Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura

Sumber : <http://dukcapil.jayapurakota.go.id/pacedukcapil/kependudukan/>

Dengan Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai karena dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta dan berada di urutan 3 wilayah dengan skala ekonomi terbesar di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2018) dengan nominal PDRB mencapai Rp305.343 miliar (Good news from Indonesia. 2020). Seharusnya Kabupaten Bekasi dapat mengimplementasikan *e-government* yang sedikit lebih baik daripada Jayapura. Kabupaten Bekasi dinilai mampu memperoleh alat dan teknologi, serta memiliki sumber daya manusia yang menyanggupi terhadap pengimplementasian *e-government* ini.



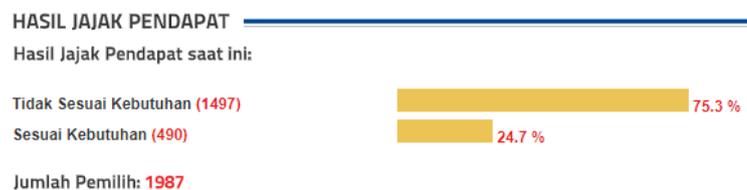
Gambar 3. Grafik Kabupaten/Kota dengan Ekonomi Terbesar di Indonesia

Sumber : Good News From Indonesia, 2020

Tantangan dan Hambatan Implementasi *e-government* di Kabupaten Bekasi

Pandemi COVID-19 ternyata telah banyak mengungkap masalah-masalah yang terjadi pada organisasi pemerintahan di Indonesia dari yang berada di pusat sampai di daerah. Ketika pandemi banyak kegiatan yang harus dibatasi termasuk akses untuk pelayanan publik. Sebelum pandemi sistem pelayanan publik di Indonesia memang sudah menerapkan sistem *hybrid*, yakni masyarakat mengakses layanan secara online untuk mendaftar dan datang ke lokasi untuk menyerahkan berkas fisik atau pendataan fisik. Ketika pandemi akses layanan publik dibatasi bahkan ketika PSBB ketat pelayanan publik mau tidak mau harus menerapkan sistem secara daring total. Terutama Ketika 33 pegawai Disdukcapil Kabupaten Bekasi positif COVID-19 pada tanggal 18 januari 2021, kantor disdukcapil harus *lockdown* dan menerapkan sistem pelayanan secara online. Lalu apakah dengan menerapkan layanan online kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik ?.

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari <https://disdukcapil.bekasikab.go.id/lihat-poling.html> memperlihatkan bahwa 75% masyarakat menilai bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi.



Gambar 4. Hasil Jejak Pendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Sumber : <https://disdukcapil.bekasikab.go.id/lihat-poling.html>

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam implementasi *e-government* pada layanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Angka 75% bukanlah angka yang kecil, ini sudah seharusnya menjadi evaluasi Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki pelayanannya. Dari penelusuran kepustakaan yang kami temukan, sebagian besar masyarakat mengeluhkan sulitnya untuk memperbaiki data kependudukan. Hal ini juga diungkapkan oleh Zulham warga Cibitung yang ingin memperbaiki data kependudukannya sangat sulit karena

ternyata data kependudukan Zulham tidak terdaftar dalam database (Panjaitan 2020). Direktur Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada tiga hambatan yang dihadapi oleh Pelayanan Disdukcapil :

1. Masih terdapat mental calo dikalangan pegawai disdukcapil.
2. Lambatnya pencetakan E-KTP dan konsolidasi *database*.
3. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengenai prosedur layanan.

Melihat dari berbagai latar belakang masalah tersebut hambatan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Bekasi ini disebabkan karena sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri belum menerbitkan pedoman penyelenggaraan situs *web* yang paten untuk pelayanan Disdukcapil secara online. Kita bisa melihat kesenjangan kualitas layanan online Kabupaten Bekasi dan Jayapura. Ini artinya setiap daerah memiliki aturannya sendiri dalam penerapan *e-government* khususnya dalam bidang layanan Disdukcapil.

Kemudian dalam bidang SDM, jika kita melihat situs website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi kita akan menilai bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Selain diperlukan pegawai yang handal dalam bidang IT tapi juga diperlukan Kepala Daerah yang sudah memiliki IT *Literacy* akan ikut meningkatkan perkembangan *e-goverment* di daerahnya.

Budi Raharjo seorang pakar telematika dari ITB mengungkapkan bahwa bidang informasi dan teknologi merupakan bidang baru dalam dunia pemerintahan. Mengingat sistem kepegawaian yang umurnya panjang akan mempersulit hadirnya insan muda yang lebih memahami kegunaan IT (Sosiawan 2008). Meskipun menurut Survei Go Indonesia yang disebar ke 1600 responden PNS di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 79,56 persen Pegawai Negeri Sipil sudah melek digital pada kenyataannya di lapangan menunjukan hasil yang jauh berbeda. Seperti yang sudah dijabarkan diatas masih banyak persoalan pendataan yang tidak terinput oleh pegawai bahkan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) yang sering mengalami kendala atau bahkan dalam proses perbaikan (Liputan 6 2016)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran secara kepustakaan, implementasi *e-government* di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terlihat belum maksimal dan gagap merespon pandemi COVID-19. Hambatan infrastruktur nampaknya masih menjadi persoalan klasik dalam implementasi *e-government* di Indonesia. Namun mengingat Kabupaten Bekasi yang jaraknya menempel dengan Ibu Kota seharusnya itu bukan menjadi hambatan. *Political will* dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membenahi pelayanan *e-government* di Kabupaten Bekasi. Jika dari *political will* saja tidak nampak maka kedepannya kualitas pelayanan *e-government* di Kabupaten Bekasi akan berjalan stagnan. Disisi lain juga dibutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pemerintah, Perguruan Tinggi maupun pihak swasta untuk melakukan pelatihan atau kursus. Pandangan yang harus ditekankan kepada pegawai yaitu keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan hanya pada teknologi yang digunakan tetapi juga kemampuan pegawai dalam mengelola teknologi tersebut.

Pada sisi kelembagaan perlu dibuat suatu model pengelolaan *e-government*, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *e-government* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi *e-government* di pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mampu mengupayakan peningkatan pelayanan secara digital di masa pandemi yang belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir. Meskipun kelak akan berakhir, *e-government* seharusnya telah

dilaksanakan sejak lama sebagai bentuk adaptasi negara dan daerah-daerah terhadap kemajuan teknologi. Sistem-sistem yang telah diterapkan secara *hybrid* akan lebih baik jika keseluruhannya dilaksanakan secara online. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus menyediakan internet yang menjangkau daerah-daerah di kabupaten ini, agar merata ke seluruh masyarakat dan tidak menimbulkan kesenjangan. Selain itu, ketidaklengkapan data-data kependudukan di birokrasi juga harus segera dilengkapi dan dilindungi kerahasiaannya karena menyangkut data individu.

Daftar Rujukan

Buku

Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Surat Kabar Online:

Aditya, Iip M. (2020, Oktober 17). "10 Wilayah Dengan Skala Ekonomi Terbesar Di Indonesia". *Good news from Indonesia*. diperoleh dari : <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/17/inilah-kabupaten-kota-dengan-skala-ekonomi-terbesar-di-indonesia> .

Liputan 6. (2016, November 9). Survei Buktikan PNS Sudah Melek Teknologi Informasi. *Liputan 6*. diperoleh dari : <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2647362/survei-buktikan-pns-sudah-melek-teknologi-informasi>

Jurnal:

Alhomoud, S., Shafi, M. (2012). Best Practices in E-Government: A Review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries. *International Journal of Electrical & Computer Science* 12(1).

Panggabean, Trie Tiffany Natasha & Anwar Saragih. (2020). "Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui E-Government Di Era New Normal." *Jurnal kebijakan dan Manajemen Pegawai Negeri*, Online ISSN : 2541-1276, Print ISSN : 1978-7103

Jurnal online

Cahyadi, Adi. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan.”
Journal The Winners 4(1): 8. [The Winners](#) 4(1):1
DOI:[10.21512/tw.v4i1.3796](https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796)

J, K Scott. (2006). “E” the People: DO US Municipal Government Web Sites Support
Public Involvement?. *Public Administration Review*.
[doi=10.1.1.93.5203&rep=rep1&type=pdf](https://doi.org/10.1.1.93.5203&rep=rep1&type=pdf)

Sukarno, B., & Saleh, F. (2021). Vertical Conflict, Public Policies, and Pandemic
Covid-19: Case Study of Central and Regional Government of DKI
Jakarta. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(1), 83-104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7904>

Laporan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2012).
Pemeringkatan E-Government Indonesia Kabupaten/Kota Diwilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Jakarta.

Website

Alfarizi, Thafsin. (2020, Juli 25). 5 M Dimasa Pandemi Covid-19 di Indonesia.
diperoleh dari :
<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html>

Newsroom Diskominfoantik. (2020, Oktober 8). Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi. diperoleh dari :
<http://bekasikab.go.id/berita/3041/mal-pelayanan-publik-kabupaten-bekasi-mulai-beroperasi>

Septiani, Maya. (2020, April 1). E-Government Sebagai Strategi Dalam
Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 Dan Efektivitas Pelayanan Publik.
diperoleh dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik>

Situs web umum tanpa penulis

Laporan Data Covid-19 pada tanggal 27 Juni 2021 di Indonesia. (2021, Juni 27).
diperoleh dari : <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-juni-2021> .

Prosiding

Sosiawan, Edwi Arief. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia.” In *Seminar Nasional Informatika*, Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bekasi No.64 Tahun 2016 “ Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statisti Kabupaten Bekasi.